

**PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, *GOOD* *GOVERNANCE*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**

Skripi

Oleh:

Mukhamad Husni Rojabi

NPM: 4319500063

Program Studi Akuntansi

Fakutas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2024



**PENGARUH SISTEM KEUANGAN DESA, *GOOD* *GOVERNANCE*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL**

Skripi

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

Mukhamad Husni Rojabi

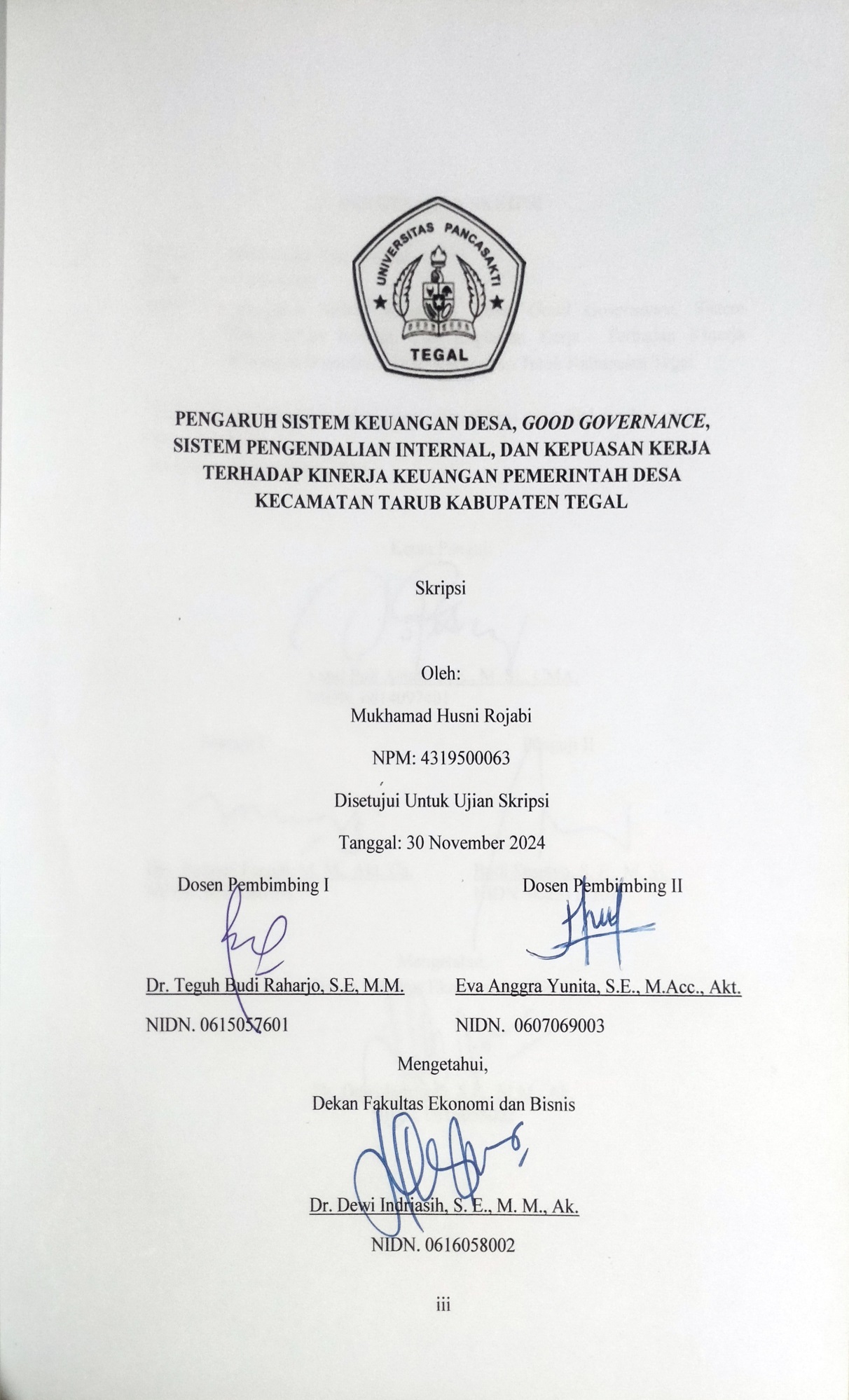
NPM: 4319500063

Program Studi Akuntansi

Fakutas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2024



# 

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO:**

“Inna ma’al ‘usri yusroo” artinya “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. (Q.S. Al- Insyirah: 6).

**PERSEMBAHAN:**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Moh. Mughofir dan Ibu Endang Purnamawati, keluarga, teman-teman dan kepada orang yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.

# 

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan proposal penelitian untuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Sistem Keuangan Desa, *Good* *Governance*, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal”.**

Proposal penelitian untuk skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi pada Program Strata (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan proposal penelitian untuk skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dewi Indriasih, S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Abdulloh Mubarok, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E, M.M., selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
4. Eva Anggra Yunita, S.E., M.Acc., Akt., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, membimbing dan memberikan saran kepada peneliti.

Kami menyadari proposal penelitian untuk skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan proposal penelitian untuk skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap proposal penelitian untuk skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 5 Desember 2024

Mukhamad Husni Rojabi

# ABSTRAK

**Mukhamad Husni Rojabi**, 2023. Pengaruh sistem keuangan desa, *good governance*, sistem pengendalian internal, dan kepuasan kerja terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Tarub.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melakukan pengujian pada Pengaruh Sistem Keuangan Desa, *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten tegal).

Populasi dalam penelitian ini adalah 20 desa yang ada di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Sampel penelitian ini adalah 80 responden yang terdiri dari 20 desa yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Teknik pengambilan datanya menggunakan metode kuesioner yang diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 22.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sistem keuangan desa, *good governance*, dan kepuasan kerja berpengaruh dalam kinerja keuangan pemerintah desa, sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Variable dapat dikatakan berpengaruh jika nilai signifikansinya < 0,05.

**Kata Kunci : Sistem Keuangan Desa, *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal, Kepuasan Kerja, Kinerja Keuangan Pemerintah Desa**

# ABSTRACT

**Mukhamad Husni Rojabi**, 2023. The influence of village financial system, good governance, internal control system and job statisfaction on the financial performance of village goverment in Tarub district.

This research aims to test the influence of village financial system, good governance, internal control system and job satisfaction on the financial performance of village government (Empirical study of village government in Tarub District, Tegal Regency).

The population of this study was 20 villages in Tarub District, Tegal Regency. The sample for this research was 80 respondents consisting of 20 villages which were the population of this research. The data collection technique uses questionnaire method which is processed using SPSS version 22 application.

The results of this research show that village financial system, good governance and job satisfaction influence the financial performance of village government while internal control system has no influence on the financial performance of village government. A variable can be said to be influential if its significance value is <0.05.

**Keywords: village financial system, good governance, internal control system, job satisfaction, village government financial performance**

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

[PENGESAHAN SKRIPSI iii](#_Toc174530521)

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN v](#_Toc174530522)

[PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc174530523)

[KATA PENGANTAR vii](#_Toc174530524)

[ABSTRAK ix](#_Toc174530525)

[ABSTRACT x](#_Toc174530526)

[DAFTAR ISI xi](#_Toc174530527)

[DAFTAR TABEL xiv](#_Toc174530528)

[DAFTAR GAMBAR xv](#_Toc174530529)

[BAB I](#_Toc174530530) [PENDAHULUAN 1](#_Toc174530531)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc174530532)

[B. Rumusan Masalah 10](#_Toc174530533)

[C. Tujuan Penelitian 10](#_Toc174530534)

[D. Manfaat Penelitian 11](#_Toc174530535)

[BAB II](#_Toc174530536) [TINJAUAN PUSTAKA 12](#_Toc174530537)

[A. Landasan Teori 12](#_Toc174530538)

[1. *Agency* *Theory* (Teori Keagenan) 12](#_Toc174530539)

[2. Pemerintahan Desa 13](#_Toc174530540)

[3. Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) 14](#_Toc174530541)

[4. *Good* *Governance* 15](#_Toc174530542)

[5. Sistem Pengendalian Internal 15](#_Toc174530543)

[6. Kepuasan Kerja 16](#_Toc174530544)

[7. Kinerja Keuangan 19](#_Toc174530545)

[B. Penelitian Terdahulu 19](#_Toc174530546)

[C. Kerangka Pemikiran 28](#_Toc174530547)

[D. Hipotesis 33](#_Toc174530548)

[BAB III](#_Toc174530549) [METODE PENELITIAN 34](#_Toc174530550)

[A. Jenis Penelitian 34](#_Toc174530551)

[B. Populasi dan Sampel 34](#_Toc174530552)

[C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 35](#_Toc174530553)

[1. Definisi Konseptual 35](#_Toc174530554)

[2. Operasional Variabel 38](#_Toc174530555)

[D. Metode Pengumpulan Data 41](#_Toc174530556)

[E. Uji Kualitas Data 42](#_Toc174530557)

[1. Uji Validitas 42](#_Toc174530558)

[2. Uji Reliabilitas 43](#_Toc174530559)

[F. Uji Asumsi Klasik 43](#_Toc174530560)

[1. Uji Normalitas Data 43](#_Toc174530561)

[2. Uji Multikolinieritas 43](#_Toc174530562)

[3. Uji Heteroskedasitas 44](#_Toc174530563)

[G. Metode Analisis Data 45](#_Toc174530564)

[1. Analisis Regresi Linier Berganda 45](#_Toc174530565)

[2. Uji Kelayakan Model (Uji F) 46](#_Toc174530566)

[3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 47](#_Toc174530567)

[4. Uji Koefisien Determinasi 47](#_Toc174530568)

[BAB IV](#_Toc174530569) [HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48](#_Toc174530570)

[A. GAMBARAN UMUM 48](#_Toc174530571)

[B. HASIL PENELITIAN 48](#_Toc174530572)

[1. Deskriptif Data 48](#_Toc174530573)

[2. Analisis Statistik Deskriptif 52](#_Toc174530574)

[3. Uji Analisis Data 54](#_Toc174530575)

[4. Uji Asumsi Klasik 57](#_Toc174530576)

[5. Metode Analisis Data 60](#_Toc174530577)

[C. PEMBAHASAN 65](#_Toc174530578)

[BAB V](#_Toc174530579) [KESIMPULAN DAN SARAN 73](#_Toc174530580)

[A. Kesimpulan 73](#_Toc174530581)

[B. Saran 74](#_Toc174530582)

[DAFTAR PUSTAKA 75](#_Toc174530583)

[LAMPIRAN 79](#_Toc174530584)

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 25

Tabel 3.1 Nama Desa Di Kecamatan Tarub 35

Tabel 3.2 Operasional Variabel 38

Tabel 4.1 Data Pembagian dan Pengembalian Kuisioner 49

Tabel 4.2 Umur Responden 49

Tabel 4.3 Jenis Kelamin 50

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir 50

Tabel 4.5 Jabatan Responden 51

Tabel 4.6 Lama Jabatan Responden 51

Tabel 4.7 Analisis Statistik Deskriptif 52

Tabel 4.8 Uji Validitas 54

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas 56

Tabel 4.10 Normalitas Data 57

Tabel 4.11 Uji Multikolinieritas 58

Tabel 4.12 Uji Heteroskedasitas 59

Tabel 4.13 Uji Analisis Regresi Linier Berganda 61

Tabel 4.14 Uji Anova 62

Tabel 4.15 Uji T 63

Tabel 4.16 Uji Koefisien Determinasi 65

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 32

# 

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengenai Administrasi Wilayah serta Peraturan Nomor Satu Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua terkait Keseimbangan Finansial Antara Pemerintahan Pusat dan Administrasi Wilayah menandakan awalnya kemandirian wilayah. Kemandirian wilayah memberi otoritas yang lebih luas guna menetapkan pengelolaan sumber daya sesuai dengan potensi daerah. Potensi daerah tersebut ditawarkan melalui otonomi daerah. Perimbangan anggaran di antara pihak berwenang nasional serta otoritas lokal pun dibutuhkan guna mewujudkan otonomi tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengawasi seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan dan pemanfaatan potensi sumber daya diperlukan untuk mengembangkan, mengelola, mengendalikan, dan mengevaluasi seluruh sumber daya tersebut guna mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kekhasan daerahnya dan aset yang dimilikinya. ( Fitriya Anggraini, 2021).

Sepuluh tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonominya. Menurut artikel dari (Santia, 2021), pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren menurun secara berkelanjutan, dengan dampak paling serius terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi virus corona, yang menyebabkan perekonomian mengalami gangguan besar. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,77%, namun pada tahun 2015, angka ini turun menjadi 4,88%. Di tahun 2020, pertumbuhannya mencapai titik terendah, hanya 2,97%, yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Situasi ini menyebabkan Indonesia kembali ke level pertumbuhan yang sama seperti pada tahun 2017, saat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,07% (Santia, 2021).

Desa adalah sebuah kelompok komunitas aturan tradisi dengan wewenang untuk mengelola administrasi, kebutuhan publik, serta maksud individu penduduk kampung. Kewajiban sejarah serta kewenangan tradisi kampung dihargai dari pemerintah serta penguasa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Berdasarkan Undang-Undang ini, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus segala urusan internalnya. Lebih lanjut, menurut Aset dkk., (2018), desa juga berwenang untuk mengatur pembangunan, tata kelola pemerintahan, pengetahuan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, pemerintah desa berwenang menyelenggarakan pemerintahan desa untuk tujuan memajukan kemakmuran warga desa. Kewenangan menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa untuk kepentingan masyarakat setempat. Desa memiliki otoritas guna mengelola serta mengalokasikan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar, selain itu desa juga berperan sebagai penerima manfaat yang terdesentralisasi dari sisa anggaran (Mataram dkk., 2019).

Distribusi Pendanaan Wilayah adalah komponen dari budget pemasukan serta pengeluaran regional distrik/kota yang disalurkan sesudah dikurangkan oleh aliran pendanaan spesifik, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 47 Tahun 2015. Namun pada kenyataannya, Alokasi Dana Desa sering kali rentan disalahgunakan melalui pihak-pihak yang kurang berintegritas, warga sekitar memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah pusat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, selain itu juga untuk meningkatkan efektivitas aparatur. Pengawasan ini diperlukan supaya pengembangan wilayah bisa berlangsung selaras mengikuti perencanaan, meskipun tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan (Damayanti, 2018).

Penyaluran dana di Kabupaten Tegal diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021, yang mengatur tentang protokol pengalokasian, pelaksanaan, dan penggunaan Dana Desa Tegalguna di Kabupaten Tegal Tahun 2022 dengan baik. Menurut Bab II Pasal 6, Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp118.087.607.000,00 (seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dana tersebut disalurkan secara merata dengan maksud untuk mendorong terciptanya prasarana koperasi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan jenjang pendidikan. Setelah dikurangi alokasi dasar, maka diperoleh total Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai ADD untuk 281 desa pada tahun 2022. Pengelolaan dana tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa setempat. Sekitar tiga puluh persen dari total ADD tersebut digunakan untuk operasional desa, dan Sebanyak 70 persen dialokasikan bagi kegiatan pengembangan warga perdesaan, berdasarkan Aturan Negara No. 11 Tahun 2019 mengenai Pemerintahan Desa (Setiana, 2017).

Kecamatan Tarub berada di Kabupaten Tegal dan berbatasan dengan Kecamatan Kemantran serta Kecamatan Talang. Kecamatan ini terdiri dari 20 desa. Pada periode 2022, Kecamatan Tarub mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 7.841.198.542,- yang didistribusikan ke 20 desa, dengan setiap desa menerima Rp 412.694.660,-. Desa Mindaka memperoleh jumlah terbesar dari alokasi tersebut, sedangkan Desa Tarub menerima alokasi terkecil.

Dana tersebut disediakan agar setiap desa bisa diatur secara optimal selaras terhadap ketentuan penggunaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tegal No 94 Tahun 2021. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah desa di Kecamatan Tarub memerlukan Kinerja Keuangan yang optimal dalam mengelola Alokasi Dana Desa (Zulfa, 2019). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terciptanya Kinerja Keuangan yang baik dalam pengelolaan ADD, yaitu peran Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes), Pelaksanaan asas Tata Kelola yang Baik, Sistem Pengendalian Internal, serta tingkat Kepuasan Kerja yang berkaitan dengan Kinerja Keuangan.

Muindro (2013:121) mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi sangat diperlukan untuk mengevaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa serta untuk mengawasi pengalokasian Dana Desa. Untuk mengatur semua informasi tersebut, dibutuhkan sebuah aplikasi yang akhirnya melahirkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Akses informasi yang terbuka menunjukkan adanya Good Governance (Pemerintahan yang Baik). Selain itu, Sistem Pengendalian Internal merujuk pada tanggung jawab masing-masing karyawan terhadap para pihak yang memberikan tugas kepada mereka.

Menurut Kisnawati dkk. (2018), sistem pengendalian internal horizontal memperkuat persyaratan sistem pengendalian internal publik di samping menyediakan pengendalian vertikal. Untuk meningkatkan standar Manajemen finansial pada level desa, Lembaga Pengontrolan Finansial dan Pembangunan (BPKP) menciptakan program Sistem Finansial Desa (SISKEUDES). Sasaran dari program Sistem Finansial Desa (SISKEUDES) merupakan guna memperbaiki kualitas manajemen finansial di desa.

Tujuan dari pembentukan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah untuk memantau keuangan desa secara efisien dan berfungsi sebagai tolok ukur atau mekanisme kontrol dalam pengaturan finansial desa, sehingga pengaturan finansial desa tetap selaras dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan (Muksin Hi. Abdullah, 2019).

Mahsun (2014) mendefinisikan kinerja sebagai kapasitas kerja yang ditunjukkan oleh hasil yang dicapai. Banyaknya kasus penyimpangan yang ditemukan dalam penilaian kinerja pegawai pemerintah Indonesia telah menyebabkan ketidakpuasan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Kinerja pejabat pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai keadaan, tetapi dua kriteria utama yang diperhitungkan adalah komitmen organisasi dan pelaksanaan asas manajemen yang efektif.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan dampak globalisasi, semakin besar pula seruan bagi pemerintah untuk menerapkan apa yang disebut manajemen negara yang efektif. Ide manajemen negara yang efektif amat krusial untuk penerapan performa finansial negara. Maka dari itu, pengaruh manajemen negara yang efektif telah menarik banyak perhatian, terutama di kalangan pegawai pemerintah (Ningsih dkk., 2011)..

Tata kelola pemerintahan yang baik sering dianggap sebagai pengelolaan pembangunan yang efisien serta akuntabel, seiring dengan nilai-nilai demokrasi dan efektivitas pasar. Sasaran adalah guna menghindari salah alokasi keuangan dari investasi, menghilangkan salah alokasi keuangan, menghilangkan korupsi administratif dan politik, menegakkan pengendalian anggaran, dan menciptakan lingkungan dalam politik dan hukum yang mendukung perluasan kegiatan komersial. Hal ini menghambat kapasitas Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat, yang berdampak pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang masih perlu ditingkatkan (Kusmayadi, 2009)..

Dokumen finansial adalah satu di antara hasil yang dibuat oleh sektor akuntansi. SDM merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan desa karena bertanggung jawab atas pengawasan keuangan negara. Kualifikasi anggota pemerintahan desa yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan sangat penting untuk diperhatikan guna membedakan antara Pengelolaan Keuangan Desa yang Efektif dan Capaian Pembangunan Desa (Kadek dkk, 2015).

Sistem pengendalian internal mencakup kompetensi aparatur tempat kerja, yaitu ciri-ciri karakter yang terkait dengan kinerja atau keberhasilan yang luar biasa dalam lingkungan kerja tertentu. Kompetensi ini disebut sebagai ciri dasar karena tertanam dalam mentalitas seseorang dan dapat digunakan untuk memprediksi berbagai skenario saat melakukan pekerjaan tertentu. (Harzita, 2010).

Kurangnya staf dan perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi menyebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan menggunakan perangkat Satuan Kerja Perangkat Desa (SKK) untuk mengelola keuangan desa secara akurat dan benar. Kurangnya pengetahuan perangkat desa tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dapat diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (Latjandu dkk., 2016).

Pernyataan ini Selaras terhadap Aturan Pemerintahan Angka 101 Tahun 2000 mengenai Pengajaran serta Pelajaran Karyawan Negara Sipil, terkhusus di Bab 10 yang menyatakan bahwa salah satu usaha peningkatan kemampuan karyawan negara sipil merupakan lewat pelaksanaan program pengajaran serta pelajaran di dalam posisi. Program ini, yang meliputi pembekalan dan kehadiran sebelum memulai kegiatan kerja, dapat diterapkan di lingkungan kerja (Fitriya Anggraini, 2021)..

Robbins dan Judge dalam (Wibowo, 2014:131) Menjelaskan kepuasan pekerjaan sebagai emosi yang baik yang timbul dari penilaian terhadap mutu pekerjaan. Seorang individu harus berinteraksi bersama kolega dan pimpinan, mengikuti aturan lembaga, memenuhi syarat prestasi, serta beradaptasi terhadap suasana pekerjaan yang minim sempurna. Di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, kepuasan kerja aparatur pemerintah daerah dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk gaji mereka. Sejak tahun 2019, banyak aparatur pemerintah desa yang terlambat dibayar gajinya, sehingga mengakibatkan operasional dusun menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Efektivitas kerja aparatur terhambat karena sebagian aparatur desa memilih menekuni karier lain akibat keterlambatan gaji yang terjadi secara berkala.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja keuangan pemerintah desa. Khasanah, (2020) meneliti pengaruh beberapa faktor terhadap kinerja keuangan pemerintah desa terkait pendanaan di Desa Brebes. Temuan Penelitian mengindikasikan bahwa walaupun faktor tata kelola yang baik berdampak baik, tetapi mengindikasikan bahwa faktor mekanisme pengawasan internal serta kepuasan kerja berdampak buruk pada prestasi keuangan pemerintah desa. Implementasi tata kelola yang baik bisa memperbaiki kualitas prestasi keuangan di pemerintah desa klaim Khasanah, (2020).

Kinerja keuangan pemerintah desa ditemukan dipengaruhi secara positif oleh penganggaran, meskipun teknologi dan pengawasan (siskeudes) tidak berdampak pada manajemen performa finansial. Di sisi lain, pola yang berbeda ditemukan dalam penelitian tentang pemahaman dan fungsi pemerintah desa dalam kaitannya dengan pembiayaan dana desa oleh Mualifu, Ahmad Guspul, (2019). Secara khusus, variabel sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh sama sekali, tetapi fungsi sistem keuangan desa sangat meningkatkan akuntabilitas pembiayaan desa.

Merujuk kepada penjelasan sebelumnya, peneliti memfokuskan studi tentang : “**Pengaruh Sistem Keuangan Desa, *Good* *Governance*, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal** ”.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?
2. Apakah *Good* *Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?
4. Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh sistem keuangan desa terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh *good* *governance* terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
3. Untuk dapat mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.
4. Untuk dapat mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Keuangan Desa di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

## Manfaat Penelitian

Studi ini diupayakan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, studi ini diharapkan mampu menjadi bahan pembelajaran tambahan dalam peningkatan pengetahuan pada ranah akuntansi dan mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1. Manfaat Praktis
2. Untuk Peneliti

Temuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi tambahan referensi keilmuan mengenai Gambaran Kinerja Keuangan Desa.

1. Untuk Instansi

Studi ini diharapakan mampu menjadi masukan atau saran dalam peningkatan keterbukaan dan pertanggungjawaban pembiayaan desa, gambaran kinerja keuangan desa khususnya bagi desa-desa di wilayah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

1. Untuk Masyarakat

Hasil yang diperoleh dari studi mampu memberikan pengetahuan masyarakat mengenai gambaran kinerja keuangan desa dan untuk bahan evaluasi pekerjaan aparatur desa pada gambaran kinerja keuangan desa.

# 

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Landasan Teori

### *Agency* *Theory* (Teori Keagenan)

Hubungan keagenan digambarkan sebagai kerangka kontraktual di mana prinsipal dan agen mencapai kesepakatan bersama di mana agen diberi wewenang untuk membuat keputusan (Jensen dan Meckling, 1976, dikutip dalam Sholihah dkk., (2020). Sebagai agen, tugas etis manajer adalah memaksimalkan keuntungan bagi pemilik, atau prinsipal, tetapi ia juga memiliki kepentingan pribadi dalam meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Sholihah dkk., (2020), mengklaim bahwa teori keagenan memiliki kegunaan pada bidang umum, negara-negara demokratis meliputi relasi agensi tidak hanya di antara pemerintah nasional dan daerah, tetapi juga antara masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah menerima kewenangan dari pemerintah federal dan wajib melaporkan pencapaiannya. Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sektor publik, hubungan kelembagaan terlihat jelas selama proses perencanaan anggaran. Pemerintah daerah menyiapkan anggaran, yang kemudian dikirim ke pemerintah provinsi.

Anggaran disetujui oleh pemerintah pusat, anggaran tersebut diserahkan ke pusat dan kemudian didistribusikan melalui pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah kecamatan kemudian melaksanakan kegiatan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Terakhir, pelaporan realisasi anggaran kepada pemerintah pusat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Lembaga legislatif dan eksekutif mempunyai hubungan di mana lembaga legislatif berfungsi sebagai lembaga utama dan lembaga eksekutif sebagai lembaga pelaksana, di samping interaksi antara pemerintah federal dan pemerintah daerah (Halim, 2007) .

Legislator didefinisikan oleh teori keagenan dalam kinerja keuangan pemerintah desa sebagai mereka yang menugaskan kekuasaan kepada badan pemerintah atau komite legislatif untuk membuat kebijakan dan menghasilkan laporan status keuangan terkini. Dalam proses ini, agen menyusun usulan kebijakan beserta laporan posisi keuangannya, yang nantinya akan diterima atau ditolak.

### Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2014, wilayah merupakan lembaga legal yang diakui serta mempunyai batasan-batasan tertentu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengurus kepentingan masyarakat. Sistem politik NKRI mengakui serta menghormati hak leluhur, hak adat, dan prakarsa masyarakat sebagai landasan uraian tersebut (Ziaggi, 2021).

Desa didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sebagai persekutuan manusia yang mendiami suatu wilayah yang ditetapkan dalam wilayah pemerintahan daerah, dan mampu mengurus rumah tangganya sendiri (Ziaggi, 2021). Dengan demikian, desa dapat dipahami sebagai suatu kawasan yang dihuni oleh warga yang terikat secara hukum, memiliki struktur pemerintahan yang paling rendah setelah kecamatan, batas wilayah yang jelas, serta kewenangan dalam mengelola urusan lokal, dan diakui oleh sistem pemerintahan negara.

### Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes)

Perwakilan BPKP Pada awal kesempatan, menciptakan program pengaturan finansial kampung tersebut di bulan Mei 2015 sebagai proyek uji coba di lingkungan BPKP. Pemerintah Kabupaten Mamasa melaksanakan implementasi pertama pada bulan Juni 2015..

Aplikasi yang berhasil dibangun selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah setelah tim yang ditunjuk selesai melakukan tahap Quality Assurance (QA). Pada akhir tahun 2015, BPKP, Kementerian, dan Kementerian Desa memutuskan untuk menggunakan aplikasi ini sebagai alat pelaporan pengelolaan realisasi keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aplikasi keuangan desa ini lebih mudah dibawa dan digunakan, bahkan oleh pengguna yang belum berpengalaman, berkat basis data Microsoft Access-nya. Transaksi keuangan desa lebih cocok dikelola menggunakan basis data Access dasar karena secara teori dianggap berskala kecil. Otoritas lokal wajib mengusulkan permintaan kepada Representatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan daerah agar bisa memakai perangkat lunak ini.

Program bagi pengelolaan finansial komunitas ini dirancang untuk mendukung wakil administrasi komunitas membuat catatan finansial yang tepat serta dapat diandalkan. Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah desa menjadi lebih cepat dan akurat dengan penggunaan Siskeudes (Sholihah dkk., 2020).

### *Good* *Governance*

Konsensus umum menyatakan bahwa *good governance* tersebut terdapat. Berdasarkan lembaga UNDP, pengelolaan pemerintah disebut baik jika aset masyarakat serta isu dikelola dengan cara efisien dan produktif, serta sesuai dengan tuntutan masyarakat. Terciptanya kerangka hukum dan politik untuk mendukung pengembangan kegiatan pemerintahan desa, terhindarnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terlaksananya disiplin anggaran, serta terlaksananya tata kelola desa kokoh serta berkomitmen selaras terhadap asas demokrasi serta efektivitas pasar, menurut Bank Dunia (Mardiasmo, 2009).

### Sistem Pengendalian Internal

Arens, (2008) menjelaskan Pengawasan Internal sebagai suatu tahapan yang memastikan tercapainya tujuan pemerintahan desa dengan Menyampaikan kepercayaan yang cukup tentang ketepatan laporan finansial, efisiensi serta optimalisasi operasional, dan ketaatan pada regulasi perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian yang efektif memberikan kontribusi pada pelaporan keuangan yang lebih andal, penggunaan aset kekuatan lembaga yang lebih efektif, serta menghindari pelanggaran pada regulasi hukum yang ditentukan di dalam akuntansi sektor publik (Pangastika, 2016: 25).

Penerapan mekanisme pengawasan internal yang efisien mampu memperbaiki keyakinan masyarakat kepada kualitas laporan aktivitas serta finansial yang disusun oleh pejabat pemerintah desa, klaim Pangastika (2016: 25). Sistem pengendalian internal suatu instansi terdiri dari perangkat, prosedur, dan struktur organisasi yang bekerja sama untuk menjaga aset instansi.

### Kepuasan Kerja

Menurut Hasibuan (2002), kepuasan kerja dalam konteks pekerjaan mengacu pada perasaan puas yang berasal dari pengakuan atas hasil kerja, penempatan kerja, perlakuan, fasilitas saat ini, dan lingkungan kerja yang mendukung. Kepuasan kerja, menurut Rivai dan Mulyadi (2011:246), adalah evaluasi seseorang tentang seberapa baik pekerjaan mereka memenuhi kebutuhan total mereka. Kepuasan kerja, menurut Colquitt, lePine, dan Wesson dalam (Wibowo, 2014:131), merupakan tolok ukur kenyamanan emosional yang berasal dari evaluasi tugas atau pengalaman kerja individu.

Kepuasan kerja sebagaimana yang didefinisikan oleh Robbins serta Hakim (Wibowo, 2014:131) merupakan sebuah pandangan baik kepada tugas individu yang timbul akibat output penilaian karakteristik tugas. Menyatakan bahwa kebahagiaan kerja adalah suatu sikap yang menunjukkan perasaan gembira dan kegembiraan mengenai tugas yang berlandaskan atas penilaian individu terhadap pekerjaan atau pengalaman kerjanya. Menurut Hasibuan, (2002), beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain kompensasi yang adil dan sesuai, penempatan berdasarkan keahlian, tingkat kesulitan pekerjaan, suasana dan lingkungan kerja, sikap pemimpin, dan sebagainya. Sifat pekerjaan, baik yang monoton maupun bervariasi, semuanya memiliki dampak terhadap kepuasan kerja karyawan.

Variabel-variabel berikut dapat berkontribusi terhadap kepuasan kerja: usia, jabatan, pangkat, jaminan sosial dan finansial, serta tingkat pengawasan. Pekerja umumnya lebih menyukai pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas, umpan balik kinerja, dan kesempatan untuk menerapkan bakat dan kemampuan mereka pada berbagai tugas. Karyawan juga mengantisipasi struktur gaji dan promosi serta pedoman promosi yang transparan, adil, dan memenuhi harapan mereka (Rivai dan Mulyadi, (2011:247)).

Indeks Pekerjaan Deskriptif (IPD) yang mencakup sejumlah lima unsur, yang meliputi: (1) Pengganti, termasuk gaji serta imbalan; (2) Ciri-ciri pekerjaan; (3) Peluang untuk kenaikan jabatan; (4) Pengawasan; serta (5) Interaksi bersama kolega dapat digunakan untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja.

Wexley dan Yuki menyebutkan tujuh penanda kepuasan kerja (Indrasari, 2017:45–46). Penanda tersebut meliputi:

1. Kompensasi. Salah satu elemen kunci yang memengaruhi kepuasan karyawan terhadap pekerjaan mereka adalah kompensasi mereka. Sama seperti ketidakbahagiaan juga dapat berasal dari kompensasi yang terlalu sedikit.
2. Supervisi. Karyawan memperhatikan aktivitas atasan saat mereka mengawasi mereka. Kepuasan kerja karyawan akan meningkat saat atasan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan mereka.
3. Pekerjaan itu sendiri. Aspek-aspek pekerjaan yang harus dihadapi oleh pekerja dalam suatu organisasi, termasuk keragaman keterampilan, identitas tugas, relevansi tugas, derajat otonomi, dan umpan balik, dapat memengaruhi kadar kepuasan kerja karyawan secara berbeda.
4. Hubungan dengan rekan kerja. Keterlibatan karyawan di perusahaan memengaruhi seberapa bahagia mereka dalam pekerjaan mereka. Kehadiran rekan kerja yang ramah dan memberi semangat akan memberikan efek positif pada kebahagiaan kerja karyawan lainnya.
5. Kondisi kerja. Karyawan akan merasa lebih mudah untuk melakukan pekerjaan mereka di tempat kerja yang rapi dan tertata dengan baik, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan kerja.
6. Peluang. Penerapan prosedur promosi yang adil di dalam perusahaan akan meningkatkan kepuasan karyawan bagi pekerja yang memiliki keinginan kuat untuk berkembang secara pribadi.
7. Keamanan kerja. Lingkungan kerja yang positif menyediakan perasaan nyaman untuk pegawai sebab mereka tidak harus khawatir akan dipecat secara tiba-tiba atau takut akan hal yang tidak diketahui.

### Kinerja Keuangan

Menurut Mahsun (2014), kinerja mengukur seberapa baik suatu kegiatan, program, atau kebijakan melaksanakan tujuan, visi, sasaran, dan tujuan bisnis sebagaimana yang digariskan dalam rencana strategisnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, kinerja juga terkait dengan hasil atau keluaran kegiatan atau program yang telah dan akan dicapai terkait dengan penggunaan anggaran, yang dapat dinilai berdasarkan kuantitas dan atau kualitas.

## Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menyelidiki investigasi relevan yang telah dilakukan. Studi sebelumnya telah berulang kali mencoba mempelajari kinerja keuangan pemerintah desa, dengan berbagai tingkat keberhasilan. Temuan studi sebelumnya tentang kinerja keuangan pemerintah desa dirangkum di sini, berikut beberapa studi terangkum dalam sajian berikut:

* + 1. Muksin Hi. Abdullah, (2019), yang mengkaji pengaruh struktur keuangan desa. Guna menguji dugaan tersebut, digunakanlah berbagai teknik statistik dan deskriptif seperti analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian memperlihatkan sistem keuangan desa dalam mengelola kinerja keuangan di Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas layanan simultan dan kemudahan penanganan laporan posisi keuangan.
    2. Fitriya Anggraini, (2021), telah dilakukan studi tentang pengaruh pengendalian intern dan tata kelola desa Mengenai prestasi manajemen finansial desa (Kajian Kasus Kantor Pemerintahan Desa di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen). Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif asosiatif kausal yang melibatkan 110 perangkat desa di Kabupaten Sragen. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini.

Uji validitas dan reliabilitas digunakan dalam prosedur evaluasi kualitas data untuk mengevaluasi ketergantungan data yang dikumpulkan untuk penyelidikan ini. Setelah uji kualitas data awal lolos, dilakukan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan kualitas data. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan desa, sementara sistem pengendalian internal tidak memberikan pengaruh.

* + 1. Awal Anuril, (2019), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja aparatur pemerintah desa di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci melakukan pengawasan keuangan desa dengan tingkat kepuasan kerja aparatur desa. Instrumen pengumpulan informasi memakai angket serta teknik observasi non partisipan, sedangkan sampel penelitian dipilih secara acak. Informasi riset dievaluasi dengan memakai teknik regresi linear ganda, dan temuan memperlihatkan bahwa kepuasan kerja dapat meningkatkan kinerja keuangan kantor Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci.
    2. Riedel Arthur Rondonuwu, Tinneke Evie Meggy Sumual, (2021), pengelolaan Dana Desa di Desa Kayuuwi, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa: Dampak Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling.

Melalui analisis data dan analisis jalur menggunakan perangkat lunak SPSS (statistical package for the social sciences), hipotesis yang menyatakan bahwa sistem keuangan desa dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan keuangan serta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa melalui kepuasan terhadap kualitas layanan akan diuji.

* + 1. Mualifu, Ahmad Guspul, (2019), penelitian ini (Studi Empiris pada Seluruh Desa di Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga) Memiliki tujuan guna memahami dampak dedikasi lembaga, kemampuan, keterbukaan, serta mekanisme pengawasan internal pada prestasi pertanggungjawaban pemerintahan daerah di dalam mengatur distribusi anggaran desa. Metode yang diterapkan pada studi ini merupakan kualitatif. Penelaahan regresi linier ganda diterapkan dalam SPSS untuk mengolah data untuk analisis penelitian ini.

Pertama, dilakukan uji validitas untuk mengetahui tingkat ketergantungan kuesioner. Dalam penelitian ini, digunakan uji normalitas, yaitu uji asumsi klasik, untuk mengevaluasi keteraturan data dalam model regresi. Temuan studi memperlihatkan bahwa kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Purbalingga terpengaruh dengan cara baik serta signifikan oleh dedikasi lembaga, sistem keuangan desa, kompetensi, dan transparansi. Faktor-faktor tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern.

* + 1. Albugis, (2016), mewujudkan sistem akuntansi keuangan daerah guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Salah satu cara untuk mengetahui besarnya sampel adalah melalui sampling aksidental. Setelah evaluasi kualitas data, pengujian validitas, dan pengujian reliabilitas berhasil diselesaikan, studi ini menguji ketergantungan dan variabilitas dalam data.

Uji kebersihan data lolos, pengujian dilakukan untuk memverifikasi adanya autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan kenormalan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa mekanisme pembukuan finansial wilayah memiliki pengaruh buruk pada performa finansial otoritas desa. Hal ini membantu menjelaskan mengapa, terlepas dari dampak kinerja keuangan, laporan posisi keuangan tidak mengikuti aturan akuntansi publik yang semakin ketat.

* + 1. Retno Astuti Dewi, Wita Ramadhanti, (2016), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014" merupakan judul penelitian yang dilakukan. Metodologi yang dipakai di dalam kajian ini merupakan berbasis angka. Informasi kajian dihimpun menggunakan alat survei serta metode observasi dengan pendekatan survei. Dua strategi pengambilan sampel, yaitu sampel acak dan insidental sampel. Keluaran kajian memperlihatkan bahwa walaupun mekanisme finansial desa tak berdampak, pengawasan internal, pemasukan tetap, serta perencanaan strategis secara statistik berpengaruh baik serta berarti pada performa keuangan pemerintahan desa.
    2. Dinda Novyasari Maharani, (2020), melakukan riset dengan tajuk "Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes): Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Desa". Metodologi yang dipakai di dalam kajian ini merupakan random murni serta penentuan contoh dilakukan secara acak. Proses pemilihan subjek penelitian yang dikenal dengan "random sampling" memberikan setiap anggota populasi, baik secara individu maupun kolektif, Kesempatan yang setara untuk terpilih sebagai sampel akhir. Menurut studi ini, ketika layanan ditambahkan ke sistem keuangan daerah, kinerja keuangan pemerintah desa juga meningkat.
    3. Patricia Watulingas, Lintje Kalangi, (2019). Peran sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintahan desa merupakan judul studi kasus yang dilakukan di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa. Salah satu metode pemilihan sampel adalah analisis triangulasi. Triangulasi data melibatkan penggunaan berbagai metode untuk memvalidasi atau membantah hasil secara independen. Menurut penelitian ini, penilaian laporan status keuangan dan layanan pelaporan meningkatkan kinerja keuangan desa dalam pendekatan sistem keuangan desa Minahasa. Selain observasi dan wawancara, peneliti juga dapat menggunakan dokumen, arsip, catatan sejarah, catatan pemerintah, tulisan atau catatan pribadi, dan foto. Kinerja keuangan pemerintahan desa di Kabupaten Minahasa terbukti meningkat secara signifikan melalui penerapan sistem keuangan desa.

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1. | Muksin Hi. Abdullah, (2019) | Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap  Kinerja Kepala Pengelolaan Keuangan Desa | Variabel Bebas:  Sistem Informasi Keuangan (SISKEUDES)  Variabel Terikat:  Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa | X1 berpengaruh positif terhadap Y |
| 2. | Fitriya Anggraini, (2021) | Pengaruh *Good* *Governance* Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Kantor Pemerintah Desa Di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen) | Variabel Bebas:  *Good* *Governance* Dan Pengendalian Internal  Variabel Terikat:  Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Kantor Pemerintah Desa Di Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen) | 1. X1 berpengaruh positif terhadap Y 2. X2 berpengaruh negatif terhadap Y |
| 3. | Awal Anuril, (2019) | Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci | Variabel Bebas:  Kepuasan Kerja  Variabel Terikat:  Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci | X1 berpengaruh positif terhadap Y |
| 4 | Riedel Arthur Rondonuwu, Tinneke Evie Meggy Sumual, (2021) | Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa | Variabel Bebas:  Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)  Variabel Terikat:  Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kayuuwi Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa | X1 berpengaruh positif terhadap Y |
| 5 | Mualifu, Ahmad Guspul, (2019) | Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga) | Variabel Bebas:  Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal,Sistem Keuangan Desa Dan Komitmen Organisasi  Variabel Terikat:  Kinerja Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga) | 1. X1 berpengaruh positif terhadap Y 2. X2 berpengaruh positif terhadap Y 3. X3 berpengaruh negatif terhadap Y 4. X4 berpengaruh positif terhadap Y 5. X5 berpengaruh terhadap Y |
| 6 | Albugis, (2016) | Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Kinerja Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara | Variabel Bebas:  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi, dan akuntabilitas  Variabel Terikat:  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara | 1. X1 berpengaruh negatif terhadap Y 2. X2 berpengaruh positif terhadap Y 3. X3 berpengaruh terhadap Y |
| 7 | Retno Astuti Dewi, Wita Ramadhanti, (2016) | Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 | Variabel Bebas:  Perencanaan, Penerapan Sistem Keuangan Desa, Penghasilan Tetap, Pengendalian Internal, Dan Penerapan Sistem Keuangan Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014  Variabel Terikat:  Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Pasca Penerapan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 | 1. X1 berpengaruh positif terhadap Y 2. X2 berpengaruh negatif terhadap Y 3. X3 berpengaruh positif terhadap Y 4. X4 berpengaruh positif terhadap Y 5. X5 berpengaruh negatif terhadap Y |
| 8 | Dinda Novyasari Maharani, (2020) | Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan Desa | Variabel Bebas:  Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)  Variabel Terikat:  Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan Desa | X1 berpengaruh positif terhadap Y |
| 9 | Patricia Watulingas, Lintje Kalangi, (2019) | Peranan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa) | Variabel Bebas:  Peranan Sistem Keuangan Desa  Variabel Terikat:  Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa) | X1 berpengaruh positif terhadap Y |
| 10 | Khasanah, (2020) | Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Tanggung Jawab Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa | Variabel Bebas:  Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, *Good* *Governance*, Komitmen Organisasi Dan Tanggung Jawab  Variabel Terikat:  Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa | 1. X1 berpengaruh positif terhadap Y 2. X2 berpengaruh positif terhadap Y 3. X3 berpengaruh positif terhadap Y 4. X4 berpengaruh positif terhadap Y 5. X5 berpengaruh negatif terhadap Y |

Sumber: Pengolahan Peneliti, 2023

Berdasarkan data studi terdahulu di atas, bisa dilihat dan diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang sama maupun berbeda dibandingkan studi ini. Perbedaan terdapat pada objek studi, karena studi dilaksanakan di beberapa wilayah di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Dan persamaannya adalah penggunaan variabel kinerja keuangan pemerintah desa, Keterbukaan, partisipasi, kompetensi, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

## Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu dan bisa dijadikan landasan perumusan hipotesis. Teori tersebut difungsikan untuk memecahkan suatu permasalahan terkait hubungan antara variabel berlandaskan dengan teorinya.

1. **Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa**

Demi memperbaiki mutu manajemen finansial pemerintah desa, Lembaga BPKP menciptakan program Sistem Finansial Desa. Nasabah dimudahkan dalam menggunakan aplikasi Siskeudes karena fitur-fiturnya yang dibuat sederhana dan tidak rumit. Ketersediaan program ini membantu penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas berkualitas tinggi oleh perwakilan pemerintah desa. Dengan menggunakan program Siskeudes, penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah desa menjadi lebih mudah dan cepat. (Muksin Hi. Abdullah, (2019).

Kinerja keuangan pemerintah desa dapat dipengaruhi oleh penerapan teknologi informasi berupa sistem keuangan desa (Siskeudes), sebagaimana dibuktikan oleh Latjandu dkk., (2016). Kinerja keuangan pemerintah desa membaik dengan penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih. Keluaran tersebut selaras dengan penelitian yang dikerjakan oleh Dinda Novyasari Maharani, (2020) & 4. Riedel Arthur Rondonuwu, Tinneke Evie Meggy Sumual, (2021) dan Patricia dkk., (2019) yang menemukan bahwa Siskeudes Berdampak baik pada performa finansial administrasi wilayah desa.

1. **Pengaruh *Good* *Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa**

Pemahaman umum tentang Pelaksanaan manajemen administrasi serta lebih diketahui menggunakan sebutan manajemen administrasi yang efektif. UNDP menjelaskan pengelolaan administrasi yang efektif sebagai pengelolaan sumber daya publik dan isu-isu terkait yang efektif dan efisien dalam menanggapi kebutuhan masyarakat.

Menurut Bank Dunia, membangun pemerintahan desa yang kuat dan terbuka yang menjaga asas-asas sistem pemerintahan rakyat serta optimalisasi ekonomi, menghindari kekeliruan di distribusi modal penanaman modal, menghentikan tindakan penyalahgunaan wewenang, persekongkolan, dan pilih kasih, memperkuat keteraturan pembiayaan, serta membentuk struktur peraturan dan regulasi guna menopang operasi pemerintah desa adalah semua contoh tata pemerintahan yang baik. (Pangastika, 2016).

Untuk meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah desa, tata kelola yang baik memastikan bahwa manajemen mematuhi nilai-nilai demokrasi dan disiplin ketika menggunakan anggaran dana desa. Tata kelola yang lebih baik berpengaruh terhadap kenaikan performa finansial administrasi wilayah desa. Temuan tersebut sesuai dengan kajian Khasanah, (2020), yang menunjukkan bahwa tata kelola yang efisien berdampak positif pada kinerja keuangan pemerintahan desa.

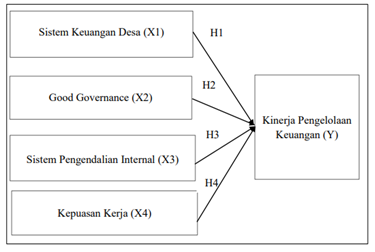
1. **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yakni suatu tata tertib yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tujuan pengendalian internal adalah untuk mencapai tujuan, menawarkan data finansial yang bisa diandalkan serta memastikan kepatuhan pada persyaratan hukum dan aturan yang relevan. Sistem ini berfungsi sebagai standar penilaian keberhasilan operasional instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya dan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sistem pengendalian internal menjamin bahwa suatu organisasi tidak menyimpang dari standar yang relevan. Kinerja keuangan pemerintah desa akan meningkat seiring dengan semakin kuatnya sistem pengendalian internal. Penelitian oleh Mualifu, Ahmad Guspul, (2019), memperlihatkan bahwa mekanisme kontrol internal mempunyai pengaruh positif terhadap performa finansial pemerintahan desa memperkuat kesimpulan ini.

1. **Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa**

Kepuasan kerja dapat diartikan sebagai kondisi perasaan serta gembira, yang diekspresikan dalam semangat kerja, disiplin, dan prestasi kerja. Menurut Hasibuan, (2002) dalam Awal Anuril, (2019), dalam konteks tempat kerja, kepuasan kerja diperoleh melalui pengakuan hasil kerja, penempatan yang sesuai, perlakuan yang baik, penyediaan perlengkapan yang diperlukan, dan lingkungan kerja yang mendukung. Pada tingkat desa, respon emosional masyarakat terhadap etos kerja, disiplin, dan prestasi yang dihasilkan dari usaha aparat desa tercermin dalam kepuasan kerja. Kinerja keuangan pemerintah desa membaik seiring dengan meningkatnya tingkat kepuasan kerja. Menurut penelitian Awal Anuril, (2019), kinerja keuangan pemerintah desa dipengaruhi secara positif oleh kepuasan kerja. Oleh karena itu, struktur pemikiran dalam kajian ini yakni:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## Hipotesis

Merujuk kepada pendapat sebelumnya, maka hipotesis terdapat pada kerangka berpikir studi ialah :

H1 : Diduga Sistem keuangan desa mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja Keuangan pemerintah desa.

H2 : Diduga *Good* *Governance* mempunyai pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3 : Diduga Sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

H4 : Diduga Kepuasan Kerja mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

# 

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian

Jenis Penelitian kualitatif yang kuantitatifkan, yaitu metodologi yang memberikan penjelasan teoritis dan uraian tentang situasi sebenarnya di lapangan, serta keterkaitan antar variabel dalam studi ini. Menurut Sugiyono (2017: 8), penelitian jenis ini memiliki prinsip positivisme yakni studi pada suatu sampel yang bertujuan mengevaluasi suatu hipotesis.

Disebut dengan kuantitatif karena pengolahan data dilakukan secara numerik dan dianalisa melalui dengan statistika. Data untuk studi ini diperoleh melalui tanggapan responden terhadap kuesioner yang diberikan kepada mereka. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, data yang dikumpulkan dari responden akan dianalisis secara statistik.

## Populasi dan Sampel

1. **Populasi**

Sugiyono, (2012: 115), mengartikan populasi sebagai area general di mana obyek ataupun subyek dengan suatu kemampuan serta karakter khusus yang telah diidentifikasi oleh peneliti yang selanjutnya akan dibuat kesimpulan. Seluruh sumber data, atau pengetahuan tentang sesuatu yang relevan dengan penelitian, juga dikenal dengan populasi. Populasinya ialah aparatur daerah di 20 desa di pemerintah desa Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

1. **Sampel**

Sampel yakni bagian lebih kecil yang dapat digunakan dalam menggambarkan karakteristik kelompok yang lebih besar itu, dengan kata lain, sampelnya khas dari kelompok yang lebih besar itu. Studi ini memakai sampel jenuh, di mana semua populasi ialah sampel karena jumlah populasi yang kecil. Dari 20 desa yang menjadi populasi penelitian ini, responden yang akan dijadikan sampel ditentukan empat orang perwakilan, yaitu: 1) Kepala Desa, 2) Sekretaris Desa, 3) Bendahara Desa dan 4) Ketua BPD. Sehingga, jumlah total sampel adalah 80 orang.

**Tabel 3.1**

**Nama Desa Di Kecamatan Tarub**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Desa** | **No** | **Nama Desa** |
| 1 | Brekat | 11 | Kemanggungan |
| 2 | Bulakwaru | 12 | Kesadikan |
| 3 | Bumiharja | 13 | Kesamiran |
| 4 | Jatirawa | 14 | Lebeteng |
| 5 | Kabukan | 15 | Mangunsaren |
| 6 | Kalijambe | 16 | Margapadang |
| 7 | Karangjati | 17 | Mindaka |
| 8 | Karangmangu | 18 | Purbasana |
| 9 | Kedokan Sayang | 19 | Setu |
| 10 | Kedung Bungkus | 20 | Tarub |

## Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

### Definisi Konseptual

Konseptual, dilansir dari Efferin, (2012) adalah makna pemanfaatan suatu konsepsi yang mempermudah penelitian untuk memilih suatu konsepsi yang akan dipakai saat di lapangan. Pada penelitian ini, definisi konsetualnya yaitu:

1. **Variabel Dependen (Variabel Terikat)**

Kinerja Keuangan Desa (Y)

Menurut Mahsun (2014), kinerja adalah ukuran seberapa sukses suatu rencana, strategi, atau kebijakan dilaksanakan dengan tujuan sesuai misi serta sasaran yang ditentukan dalam perencanaan strategis instansi. Kinerja didefinisikan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja dapat diukur dari segi kuantitas dan kualitas serta mengacu pada hasil atau capaian program atau kegiatan yang sudah atau bakal diraih berhubungan dengan pemanfaatan anggaran. Derajat pencapaian inisiatif yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan, misi, dan aspirasi pemerintah desa sebagaimana diartikulasikan dalam perencanaan strategisnya tercermin dalam kinerja keuangan pemerintah desa.

1. **Variabel Independen (Variabel Bebas)**
2. **Sistem Keuangan Desa (X1)**

Sistem keuangan desa sangatlah penting dalam pemerintahan desa dan mendukung kepala desa beserta aparatur perangkat desa dalam mengatur dan mengelola keuangan sehingga tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Jika aparatur desa berperanan secara maksimal untuk mengelola keuangan suatu desa, maka kinerja keuangan pemerintah desa pengelolaannya dapat dikelola dengan baik Dinda Novyasari Maharani, (2020).

1. **Good Governance (X2)**

Good Governance sering diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Dari segi pandang UNDP, *governance* dikatakan baik (*good*) apabila sumber daya publik dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang merupakan respon dari kebutuhan masyarakat (Pangastika, 2016).

1. **Sistem Pengendalian Internal (X3)**

Menurut Arens, (2008) menyatakan bahwa Pengendalian Internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan pemerintah desa tentang reliabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan akuntansi sektor publik yang berlaku. Sistem pengendalian internal ini meliputi stuktur organisasi, cara-cara dan alat yang akan dikoordinasikan didalam suatu perusahaan atau instansi guna menjaga keamanan harta yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi.

1. **Kepuasan Kerja (X4)**

Keadaan emosi yang positif merupakan definisi kepuasan kerja. Sentimen ini merupakan definisi kepuasan kerja yang tercermin dalam prestasi, disiplin, dan etos kerja. Dalam konteks pekerjaan, kepuasan kerja adalah pengalaman yang menyenangkan yang dirasakan saat menerima pujian atas hasil kerja, mendapatkan penempatan yang sesuai, menerima perlakuan yang baik, memiliki peralatan yang mendukung, serta berada dalam lingkungan kerja yang baik (Hasibuan, 2002).

### Operasional Variabel

Uma Sekaran, (2011), menjelaskan variabel atau peubah merupakan sesuatu pembeda atau variasi kepada nilai. Ada dua jenis peubah dalam studi ini, yaitu terikat dan juga bebas dengan pengaruhnya terhadap peubah terikat. Dibahas lebih lanjut lagi oleh Uma Sekaran, (2011), yakni peubah terikat sangat mempengaruhi peubah bebas. Tabel operasionalnya ialah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

**Operasional Variabel**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Pertanyaan/ Pernyataan** | **Skala** |
| Sistem Keuangan Desa (X1) | 1. Sikap Kerja | 1. Memiliki kemampuan menggunakan komputer | Aparatur pemerintah desa harus pandai mengoperasikan komputer. | Interval |
| 1. Memiliki sikap yang baik dalam pengelolaan dana desa | Sistem pelaporan keuangan desa harus menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. | Interval |
| 1. Memiliki sikap yang jujur dalam pengelolaan dana desa | Aplikasi sistem keuangan desa memudahkan Pemerintah desa dalam membuat anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. | Interval |
| 1. Kemampuan kerja | 1. Mampu terlibat dalam proses perencanaan penggunaan dana desa | Aplikasi ini dapat membantu pemerintah desa untuk melakukan kompilasi, pengawasan, dan evaluasi RAPBDES. | Interval |
| 1. Mengelola dana desa dengan baik | Pengumuman anggaran dana desa kepada masyarakat harus menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. | Interval |
| *Good Governance* (X2) | 1. Informatif | 1. Informasi dapat diakses | Aparatur pemerintah desa berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. | Interval |
| 1. Keterbukaan | 1. Akses mudah | Perangkat pemerintah desa harus memahami ilmu akuntansi. | Interval |
| 1. Masyarakat ikut musrenbang | Perangkat pemerintah desa memahami setiap tugasnya dan melaksanakannya dengan baik. | Interval |
| 1. Pejabat bersikap *welcome dan open management* | Perangkat pemerintah desa mampu membimbing karyawan lain dalam melaksanakan tugasnya. | Interval |
| 1. Pengungkapan | 1. Tepat waktu | Informasi terkait laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu. | Interval |
| Sistem Pengendalian Internal (X3) | 1. Pelaksanaan | 1. Mempunyai program | Pemerintah desa memiliki struktur organisasi yang jelas. | Interval |
| 1. Tujuan dari program | Adanya kejelasan tugas, fungsi, dan wewenang dalam pemerintah desa. | Interval |
| 1. Program yang mensejahterakan masyarakat | Mempunyai rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran. | Interval |
| 1. Mengetahui pelaksanaan program | Aparatur pemerintah desa selalu menerapkan perilaku dan norma yang baik dalam setiap kegiatan. | Interval |
| 1. Pengambilan manfaat dan Evaluasi | 1. Ikut dalam perkembangan | Aparatur pemerintah desa menjalin hubungan yang baik dengan instansi terkait sehubungan dengan program kerja yang dilaksanakan. | Interval |
| Kepuasan Kerja (X4) | 1. Pengetahuan | 1. Apresiasi | Kinerja kepala desa sudah melakukan tugasnya dengan baik. | Interval |
| Lingkungan kerja pemerintah desa bersih dan sehat | Interval |
| 1. Pengalaman | Masyarakat desa dapat mengakses dan mengetahui dengan mudah informasi laporan keuangan melalui seluler | Interval |
| 1. Keterampilan | 1. Melaksanakan pekerjaan | Petugas desa hadir tepat waktu dalam pelayanan kepada masyarakat | Interval |
| Petugas pemerintah desa ramah dalam pelayanan kepada masyarakatnya | Interval |
| Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y) | 1. Tanggung jawab laporan keuangan | 1. Laporan ADD rahasia | Perangkat desa harus menjaga kerahasiaan kinerja keuangan pemerintah desa. | Interval |
| 1. Laporan secara terbuka, cepat, dan tepat | Informasi laporan keuangan desa diupload dengan tepat waktu dan dilaksanakan dengan cepat dan terbuka. | Interval |
| 1. Aturan pengelolaan keuangan desa | 1. Penggunaan laporan | Pelaporan kinerja keuangan menigkatkan investasi pemerintah desa. | Interval |
| 1. Laporan ADD secara jujur | Pelaporan kinerja keuangan dilakukan secara jujur. | Interval |
| Informasi yang diumumkan kepada masyarakat terkait anggaran dapat meningkatkan kinerja keuangan desa. | Interval |

Sumber: Data yang diolah, 2023

## Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua macam data pada sebuah studi, yakni sekunder dan primer. Data merupakan informasi sekunder yang diperoleh dari karya-karya yang telah dipublikasikan sebelumnya, seperti buku, artikel, dan pedoman diskusi. Respons kuesioner dari responden berfungsi sebagai sumber data primer, meskipun peneliti juga menangani data secara langsung. Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner di seluruh desa yang termasuk dalam Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal

## Uji Kualitas Data

Untuk menentukan ketepatan dan kualitas dari sebuah penelitian, beragam pengujian dilaksanakan yakni:

### Uji Validitas

Sugiyono, (2012), mengatakan bahwa validitas mengacu pada derajat kesesuaian data sebenarnya terhadap data dari peneliti. Jadi, keabsahan data dapat dilihat jika tidak ada data yang berubah diantara deskripsi peneliti tentang data dan data yang sebenarnya. (Untuk Mewujudkan Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Good Governance dan Sistem Pengendalian Internal, serta Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, 2023).

Menurut Ghozali, (2016), korelasi bivariat antara skor konstruk secara keseluruhan dan setiap skor indikator dapat digunakan untuk menentukan validitas. Kriteria yang menyatakan bahwa suatu soal dianggap Valid jika r perhitungan lebih tinggi atau setara dengan r tabel (0,000 ≥ 0,05) dan tidak sahih jika nilai r lebih rendah atau setara dengan r dalam tabel (0,000 ≤ 0,05) dapat digunakan untuk menguji keabsahan soal. Pertanyaan dianggap dapat diterima jika statistik r lebih besar atau sama dengan r tabel (0,000 ≥ 0,05), dan dianggap tidak sahih apabila r hitung berada di antara keduanya (0,000 ≤ 0,05).

### Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016), pengujian ini digunakan dalam penilaian reliabilitas suatu kuesioner yang berfungsi sebagai proksi dalam konsep atau variabel. Menurut Uma Sekaran (2006) dalam Khasanah, (2020), peubah dianggap mampu diandalkan apabila memiliki skor Cronbach Alpha melebihi dari 0,70 ketika memanfaatkan program SPSS.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas Data

Pengujian yang paling dasar dari analisis multivariat. Tes Kolmogorov Smirnov dapat dipakai untuk menentukan normalitas sampel tunggal. Uji Kolmogorov adalah perbandingan distribusi data yang ditinjau dengan distribusi standar. Distribusi standar diyakini mewakili data normal yang telah diubah menjadi Z-score. Jika nilainya 0,05, tidak ada perbedaan yang besar dari signifikansinya; namun, jika nilainya kurang dari 0,05, ada perbedaan substansial.

### Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016), multikolinieritas berguna dalam melihat keberadaan hubungan antar peubah bebas pada model regresi. Jika ini ditemukan, variabelnya ortogonale dengan nol koefisien hubungan. Tolerance and Variance Factor (VIF) adalah dua istilah yang digunakan dalam regresi untuk menunjukkan adanya multikolinearitas.

Toleransi sementara digunakan untuk mengukur fluktuasi variabel independen tertentu di mana faktor-faktor independen tambahan tidak dapat menjelaskan. Dapat juga memanfaatkan uji tolerance. (Ghozali, 2016).

Pengujian skor Tolerance yaitu :

1. Apabila skor Tolerance lebih tinggi daripada 0,10 berarti tidaklah terbukti adanya multikolinieritas.
2. Apabila skor Tolerance lebih rendah daripada 0,10 berarti adanya multikolinieritas.

Uji Skor VIF yaitu :

1. Apabila skor VIF < 10,00 berarti tidak adanya multikolinieritas.
2. Apabila skor VIF > 10,00 berarti adanya multikolinieritas.

### Uji Heteroskedasitas

Tujuan pengujian ini ialah menentukan apakah varian residual dari dua penelitian yang berbeda berbeda satu sama lain. Alat alat untuk memverifikasi keberadaan sesuatu. Grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID akan diperiksa terdapat atau tidaknya suatu model untuk mendeteksi heteroskedastisitas. diestimasi jika sumbu Y menampilkan sumbu Y, dan residual terstudentisasi (Y prediksi - Y aktual) diwakili oleh sumbu X (Ghozali, 2016).

## Metode Analisis Data

Ini adalah langkah dalam proses penelitian di mana data yang diperoleh digunakan untuk mengatasi perumusan masalah. Analisis data dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni kualitatif yangn disusun dengan memecahnya menjadi komponen yang dapat dikelola dan dicari yang dapat dievaluasi untuk polanya, dan juga kuantitatif yang dianalisis dengan statistika.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan (Sugiyono, 2012), peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda guna melakukan pengujian antara variabel bebas dengan variabel terikat (nilainya naik atau turun). Rumus dari analisis regresi linear berganda yaitu:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Keterangan :

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

X1 : Sistem Keuangan Desa

X2 : Good Governance

X3 : Sistem Pengendalian Internal

X4 : Kepuasan Kerja

a : Konstanta

b1:b4 : Koefisien regresi dari variabel X

e : Error/Epsilon (Faktor lain diluar X yang mempengaruhi Y)

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingakatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan F < 0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel independent secara simultan mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016).

Temuan dari tes statistik f untuk mengetahui dampak seluruh faktor independen dengan cara bersamaan pada faktor dependen. Tingkat signifikansi yang menjadi acuan 0,05 atau 5%. Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan variabel bebas secara bersamaan mempunyai pengaruh variabel terikat, atau sebaliknya (Ghozali, 2016).

Uji F secara bersama bertujuan untuk mencari tahu keberadaan atau ketiadaan dampak di antara faktor independen pada faktor dependen. Uji ANOVA merupakan metode uji hipotesis yang memungkinkan kesimpulan dibuat menggunakan data yang dianalisis. Pengambilan putusan pengujian dilakukan mengacu pada nilai F di tabel ANOVA, dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan 0,05. Ketetapan uji F dijelaskan sebagai berikut (Ghozali, 2016) :

1. Jika nilai signifikan F < 0,05 maka H0ditolak dan H1 diterima. Artinya semua variabel independent/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.
2. Jika nilai signifikan F > 0,05 maka H0 diterima dan H1 Artinya, semua variabel independent/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

### Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian berguna dalam memperhatikan sajian coefficient yang ada di SPSS, yakni:

1. Terbukti signifikansinya jika r < (0,05) yang berarti H1 diterima.
2. Tidak terbukti signifikansinya jika r > (0,05) yang berarti H1 ditolak.

### Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali, (2016), koefisien ini untuk mengetahui seberapa kapasitas model natural dapat memaparkan fluktuasi peubah bebas. Tujuannya untuk mengkuantifikasi fraksi variabel dependen yang dicirikan oleh regresi. Nilai R2 bergerak dari 0 ke 1, namun jika R2 = 0 menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang sempurna, tetapi jika R2 = 1 maka menyiratkan hubungan antara fluktuasi Y dan X yang dapat dijelaskan oleh X (Ghozali, 2016). Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama–sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen.